GEREJA MEMBUTUHKAN POLITIK DAN POLITIK MEMBUTUHKAN GEREJA



Nama : Daud Padondan

Nirm : 3020175503

Prodi : Kepemimpinan Kristen

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Gereja dan Politik, dengan judul "Gereja membutuhkan Politik dan Politik membutuhkan Geraja."

Kiranya makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa untukmengetahui tentang bagaimana Gereja membutuhkan Politik dan Politik membutuhkan Geraja. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata saya sampaikan terimakasih pada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melancarkan segala usaha saya.

To'Kumila, 2 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I PENDAH	IULUAN:
ā	a. Latar Belakang
k	o. Rumusan Masalah
C	Tujuan dan Manfaat
BAB II PEMBAI	HASAN:
ā	a. Pengertian Gereja, Politik dan Agama
k	o. Apakah Gereja membutuhkan Politik
C	. Apakah Politik membutuhkan Gereja atau Agama
BAB III PENUT	UP:
	Kesimpulan
	Saran
	Daftar Pustakan

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggungjawab di dalam bergereja, orang Kristen pasti memiliki hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana orang Kristen menempatkan posisinya di dalam situasi yang demikian. Di mana hubungan gereja dan negara tidak terlepas dari masalah bahkan sudah ada sejak lama. Hubungan itu sesuatu yang dinamis dari waktu ke waktu. Dalam hal inilah bagi orang Kristen perlu pemahaman yang Alkitabiah tentang hubungan Gereja atau orang Kristen dengan negara atau pemerintah. Pada prinsipnya Gereja memahami bahwa kehadirannya adalah sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia (Mat. 5 : 13,14). Dasar inilah yang mewarnai semua misi, sikap, aktivitas dan pelayann gereja, dalam berbagai kegiatan kehidupan. Dalam konteks pemahaman itu, dapat dilihat sikap Yesus Kristus dan para rasul terhadap pemerintah pada masanya masing-masing. Dalam kehidupan gereja, sikap itu ada kalanya berubah dan berbeda sesuai dengan keadaan dan konteksnya. Namun menjadi garam dan terang tetap menjadi dasar teologis untuk memahami hubungan Gereja atau orang Kristen dan negara atau pemerintah pada masa kini. Trilogi panggilan gereja di dunia yakni Marturia (Bersaksi), Koinonia (Bersekutu) dan Diakonia (melayani) harus dilakukan dengan dasar teologis yang benar¹. Melalui pemahaman Alkitabiah hubungan Gereja dan Politik akan membuka kesadaran yang

¹ Dr. Adolf Bastian Simamora, Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia, <u>Https://Www.Researchgate,Net</u> Diakses 2 Maret 2020, 20.45 Wita

penting bahwa Gereja dan Politik saling membutuhkan. Dalam memperoleh data dalam malakah ini, menggunakan sumber literature dan studi Alkitab.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dengan pertanyaan Apakah Gereja membutuhkan Politik dan sebaliknya; Apakah Politik membutuhkan Gereja atau Agama?

c. Tujuan dan manfaat

Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaiamana Gereja membutuhkan Politik dan sebaliknya.

Manfaat yang dapat diperoleh dari makalah ini adalah: Pertama, mengetahui pengertian dari Gereja dan Politik; Kedua, memahami bagaimana gereja dan politik sama-sama membutuhkan, ketiga, peran Gereja terhadap Politik.

BAB II

PEMBAHASAN

a. Pengertian Gereja dan Politik

Gereja

Istilah Gereja berasal dari bahasa latin *ecclesia* dan berasal dari bahasa Yunani *ekklesia*. Dan kata ini tertulis dalam Perjanjian Baru; misalnya diterjemahkan dengan kata *orang atau jemaat* (dahulu diterjemahkan dengan kata "sidang" ataupun "sidang jemaat"); jemaat dari segala tempat dan segala abad, persekutuan segala orang percaya; sering juga disebut gereja yang tidak kelihatan (Mat. 16:18); jemaat di suatu kota (Kis 5:11); jemaat yang berkumpul di sebuah rumah (Rm 16:5)². Lebih lanjut menurut Boland dan Niftrik, untuk memahami apa

² R. Soedarmo, *Kamus Istilah Teologi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, hlm, 30.

artinya Gereja, ada baiknya juga memerhatikan kata-kata untuk "Gereja" dalam beberapa bahasa barat, misalnya kata Inggris "Church", kata Belanda "Kerk" dan kata Jerman "Kirche". Agaknya kata-kata itu berasal dari kata Yunani *kyriake*. Kata sifat ini dipakai untuk apa yang tergolong kepada Kyrios, apa yang menjadi milik Kyrios. Itulah Gereja yakni orangorang yang mengaku menjadi milik Yesus Kristus. Jika Gereja bukanlah *Gereja Kristus*, ia sama sekali tidak dapat disebut Gereja.³ Menurut Eka Darmaputra baik secara eitimilogis maupun semantik, Gereja adalah orang-orangnya. Sebagaimana dikatakan dengan tepatnya oleh Martin Luther bahwa Gereja adalah sebuah kongregasi, sebuah *assembly*, sebuah komunitas. Pendek kata Gereja adalah sebuah persekutuan. Persekutuan di dalam Kristus. Persekutuan dengan Kristus⁴

Politik

Politik dari bahasa Yunani "politikos", yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

³ G.C. Van Niftrik dan B.J. Boland, *Dogmatika Masa Kin*i, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001,

hlm, 361.

⁴ Martin L. Sinaga , Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm, 409.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Politik diakses 2 maret 2020, 21.02 Wita.

politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. ⁶

b. Apakah Gereja membutuhkan Politik?

Gereja membutuhkan Politik hal ini bisa kita lihat dari ciri yang paling khas dari politik didasarkan pada perspektif Alkitab, atau Kerajaan Allah itu, adalah hadirnya suatu tatanan kehidupan yang memungkinkan seluruh insan ciptaan Tuhan dapat hidup dalam kesejahteraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran. Menggali pemahaman iman Kristen menyangkut politik dan dapat menjadi pendorong keberanian untuk menerjemahkannya secara pas ke dalam realitas konkret. Artinya, terurai pemahaman yang jelas dan pasti menyangkut sikap iman untuk menjadikan politik sebagai keharusan pelayanan. Meningkatkan prakarsa dan partisipasi politik dalam pengembangan karakter bangsa dan Negara yang beradab dan imaniah. Meningkatkan dan mengembangkan pola kehidupan beriman pada arena politik masyarakat Indonesia yang bercirikan pluralitas. Mendorong prakarsa bagi kehidupan masyarakat yang solider, kerja sama seluruh komponen pada segala jenjang dan aras. Gereja dalam eksistensinya di dunia ini, terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Mungkin saja sejarah masa lalu masih berlaku dalam kehidupan bergereja saat ini di mana adanya bantuan-bantuan yang selalu diberikan oleh pemerintah terhadap gereja, mulai dari pembiayaan pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori hingga memfasilitasi setiap persidanganpersidangan gerejawi pada aras tertinggi di tingkat sinodal sampai ke tingkat jemaat. Gereja ada di dunia, itu berarti harus menerangi dunia

⁶ Sirait Saut Hamonagan, "Politik Kristen di Indonesia", BPK-Gunung Mulia

termasuk politik. Hak politik haruslah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan umat. Berpolitik di sini adalah memperjuangkan hak umat.⁷ Menarik untuk disimak penulis mengutif tulisan Dr. Jim Haris dalam artikel *The Church's Role in Politics (1999)* yang mengatakan gereja punya peran penting dalam politik. Ia mengajukan dua alasan yakni : *pertama*, banyak warga gereja yang setiap hari harus menghadapi masalah

sosial-politik-ekonomi. Kebijakan politik dibuat pemerintah yang berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan warga gereja. Gereja tidak bisa lepas dari realitas yang dihadapi jemaatnya. Bahkan Alkitab telah menujukkan banyak tokoh yang aktif terlibat dalam politik seperti Amos dan Daniel. Johanes Pembabtis dan Yesus Kristus juga banyak berbicara tentang kondisi politik pada masa mereka. Keterlibatan gereja dalam politik merupakan bentuk reflektif iman terhadap lingkungan sekitarnya. Kedua, gereja harus membawa suara kenabian. Kenabian yang dimaksud adalah membawa suara Allah kedalam proses pembuatan kebijakan, stuktur dan isu-isu yang mengarah pada kemanusian secara umum. Gereja harus berani mengatakan "setuju" dan "tidak setuju" terhadap kebijakan dan janji pemerintah. Keputusan gereja menyatakan "setuju" berarti mendukung program pemerintah yang komit kepada penyediaan pendidikan yang bermutu, memberikan akses kesehatan yang baik dan significant dan hal-hal lain yang membuat kehidupan warga menjadi lebih baik. "Tidak" ditujukan kepada tindakan penyelengara pemerintahan yang koruptif, manipulatif, sengaja melakukan kesalahan dan tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat.

c. Apakah Politik membutuhkan Gereja atau Agama?

Politik membutuhkan Gereja. Orang Kristen sebagai orang yang percaya yang terpanggil dan telah menerima tugas dari Yesus Kristus harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di segala bidang kehidupan. Orang Kristen harus mempunyai kebiasaan untuk melihat seluruh masyarakat yang

⁷ Bruce Chilton, Studi Perjanjian Baru bagi Pemula, Jakarta :BPK Gunung Mulia, 2004: hlm. 53-54.

berpolitik dan peraturan-peraturan politik dibawah penghukuman dan anugerah Allah. Itu dapat diartikan bahwa orang Kristen berpartisipasi dibidang politik ialah karena segi politik itu tetap di bawah kuasa dan anugerah Allah (bnd. Rm.13:4). Orang kristen atau Pendeta sebagai warga negara harus aktif dalam politik dengan cara tetap hidup sebagai garam dan terang. Orang Kristen tidak hanya sebagai warga negara yang baik tetapi dia harus mampu menggambarkan atau memperlihatkan kehendak Allah di dalam kehidupannya yaitu di dalam kehidupan berpolitik. Orang Kristen bertanggung jawab untuk memelihara dan menumbuhkan kesatuan dan persatuan antara umat yang berbeda agama (bnd. Mat. 5:13-16; I Ptr. 2:12). Gereja dalam eksistensinya di dunia ini, terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Mungkin saja sejarah masa lalu masih berlaku dalam kehidupan bergereja saat ini di mana adanya bantuanbantuan yang selalu diberikan oleh pemerintah terhadap gereja, mulai dari pembiayaan pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori hingga memfasilitasi setiap persidangan-persidangan gerejawi pada aras tertinggi di tingkat sinodal sampai ke tingkat jemaat. Memang perlu disadari bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah sesuatu yang lumrah/wajar, karena pemerintah adalah mitra gereja tetapi janganlah bantuan-bantuan itu dapat menghilangkan daya kritis gereja dan menghalangi kenabian. Bantuan pemerintah tersebut bisa suara mempersubur budaya *malu hati* dalam gereja sehingga gereja yang memiliki kekuatan moral tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja ada di dunia, itu berarti harus menerangi dunia termasuk politik. Hak politik haruslah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan umat. Berpolitik di sini adalah memperjuangkan hak umat. Bukan masuk dalam partai politik dan memperebutkan kekuasaan. Gereja sebagai penyalur suara kenabian harus terus menunjukan eksistensinya. 8

⁸ Samuel Benyamin Hakh, Pemberitaan Tentang Yesus Menurut Injil Sinoptik, Bandung : *Jurnal Info Media*,2008, hlm. 23-166,187-213; juga Marulak Pasaribu, *Eksposisi Injil Sinoptik*, Malang : Gandum Mas, 2005, hlm 135-178

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa gereja membutuhkan politik untuk menggali pemahaman iman Kristen menyangkut politik dan dapat menjadi pendorong keberanian untuk menerjemahkannya secara pas ke dalam realitas konkret. Artinya, terurai pemahaman yang jelas dan pasti menyangkut sikap iman untuk menjadikan politik sebagai keharusan pelayanan. Meningkatkan prakarsa dan partisipasi politik dalam pengembangan karakter bangsa dan Negara yang beradab dan imaniah. Sedangakan Politik membutuhkan Gereja untuk menjadi garam dan terang, bertanggung jawab untuk memelihara dan menumbuhkan kesatuan dan persatuan antara umat yang berbeda agama (bnd. Mat. 5:13-16; I Ptr. 2:12).

Saran

Gereja harus ada dalam proses perumusan kebijakan publik. Gereja harus aktif mempengaruhi kebijakan negara melalui politik. Gereja tidak bisa menarik diri atau diam terhadap proses politik.. Gereja harus seperti nabi, berbicara atas nama Allah. Gereja harus memberitakan nilai-nilai etika yang memperkaya bangsa. Gereja harus berani dan tegas, konstruktif dan inovatif khususnya terhadap korupsi, ketidakadilan, kesewenang-wenangan penguasa. Gereja harus menjadi "garam dan terang" dalam lingkungan baik dalam masyarakat maupun di pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Simamora, Adolf Bastian, Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia, https://www.Researchgate,Net Diakses 2 Maret 2020, 20.45 Wita
- Soedarmo, R., *Kamus Istilah Teologi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002
- Niftrik, G.C. Van dan B.J. Boland, *Dogmatika Masa Kin*i, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001,
- Sinaga, Martin L. , *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputr*a, Jakarta: BPK

 Gunung Mulia
- https://id.wikipedia.org/wiki/Politik diakses 2 maret 2020, 21.02 Wita
- Hamonagan, Sirait Saut, " *Politik Kristen di Indonesia*", BPK-Gunung Mulia
- Chilton, Bruce, *Studi Perjanjian Baru bagi Pemula*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004
- Hakh, Samuel Benyamin, Pemberitaan Tentang Yesus Menurut Injil Sinoptik, Bandung : *Jurnal Info Media*,2008, hlm. 23-166,187-213;
- Pasaribu, Marulak, *Eksposisi Injil Sinoptik*, Malang : Gandum Mas, 2005,